

## INTISARI

Tesis ini menganalisis respon Tiongkok terhadap tuduhan praktik otoritarianisme digital yang mengekang kebebasan berekspresi masyarakat lewat kebijakan digital dan pengawasannya. Melalui konsep *counter-discourse* respon Tiongkok dalam membela pemerintahannya dipahami sebagai bentuk kekuatan diskursus Tiongkok melawan dominasi ideologi barat yang telah mengakar di praktik diskursus HAM global. Argumen utama dari tesis ini ialah memahami adanya dua jenis *counter-discourse* dari Tiongkok yaitu, secara independen dengan memanfaatkan kekuatan media milik negara, berpartisipasi dalam dialog HAM global, dan membangun forum diskusi yang mendukung narasi *cyber sovereignty*-nya. Lalu cara kedua ialah dengan memperluas dukungan terhadap wacana pembangunan dan HAMnya bersama negara lain lewat *Digital Silk Road* dan SSHRF, serta bersama *Like Minded Group* dan *Group of Friend* mengkritik dominasi diskursus Barat yang menciptakan praktik unilateralisme di PBB. Tesis ini juga menggunakan konsep *regime of truth* untuk memahami bagaimana diskursus HAM awalnya tercipta dari supremasi kekuatan negara barat yang lalu berkembang lewat kontrolnya terhadap media. Upaya Tiongkok melawan narasi HAM pada diskursus global ini menyematkan isu relativisme budaya, inklusivitas, dan strategi Xi Jinping membangun standar normatif sistem global yang lebih menghormati kedaulatan negara dan integritas nasional.

Kata Kunci : Universalisme, Teknologi Pengawasan, Dominasi diskursus, *Eurocentric*

## **ABSTRACT**

This thesis analyzes China's response to practices accusation of digital authoritarianism practices that curb people's freedom of expression through digital policies and surveillance. Through the concept of counter-discourse, China's response in defending its government is understood as a form of discourse power against the domination of western ideology which has taken root in the practice of global human rights discourse. The main argument of this thesis is to understand the existence of two types of counter-discourse from China, namely, independently by utilizing the power of state-owned media, participating in global human rights dialogue, and building discussion forums that support its cyber sovereignty narrative. Then the second way is to expand support for development and human rights discourse with other countries through Digital Silk Road and SSHRF, and together with the Like Minded Group and Group of Friends to criticize the dominance of Western discourse which creates the practice of unilateralism at the UN. This thesis also uses the concept of regime of truth to understand how human rights discourse was initially created by the supremacy of western powers which then developed through their control over the media. China's efforts to fight the human rights narrative in global discourse embed issues of cultural relativism, inclusivity, and Xi Jinping's strategy to build normative standards for the global system that is more respectful of state sovereignty and national integrity.

**Keywords:** Universalism, Surveillance Technology, Discourse Domination, Eurocentric